

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh penulis mengenai pembahasan dari rumusan masalah karya tulis, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban Dana BOS SDN 15 Bathin Solapan direkapitulasi di dalam Laporan SPJ Dana BOS tahap I, II, dan III. Laporan SPJ Dana BOS terdiri dari buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, formulir K7a, Laporan BOS per tahap, dan berbagai bukti terkait transaksi. Laporan SPJ BOS tersebut dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tiap tahun dan dilaporkan pula pada *database* Dana BOS pusat setiap tahap tahun berjalan.
- 2) Jumlah realisasi penggunaan Dana BOS di SDN 15 Bathin Solapan pada tahun anggaran 2020 sejumlah Rp252.941.289,00 dari realisasi penerimaan anggaran sejumlah Rp250.920.000,00 atau dengan persentase 101%. Terdapat perbedaan nominal antara realisasi penggunaan Dana BOS dan realisasi penerimaan anggaran Dana BOS tahap II sebesar Rp2.021.289,00. Selisih sebesar Rp2.021.289,00 pada realisasi tersebut merupakan hasil dari dinamika jumlah siswa di SDN 15 Bathin Solapan dan tidak sinkronnya data Dapodik pusat dengan yang dilaporkan sekolah.
- 3) Jumlah realisasi penerimaan anggaran Dana BOS di SDN 15 Bathin Solapan pada tahun 2020 sejumlah Rp250.920.000,00 dari RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sejumlah Rp251.100.000, atau dengan persentase 99,93%. Terdapat perbedaan nominal antara rencana dan realisasi sebesar Rp180.000,00. Jumlah tersebut terlihat tidak material. Namun, penulis berpendapat jika telah terjadi revisi RKAS sampai bulan Oktober, seharusnya sudah sesuai dengan

nominal di realisasi karena alokasi dana tahap III dari pusat terjadi pada bulan September. Kemudian, penulis berdiskusi dengan Kepala Sekolah dan Operator dan kembali menemukan jawaban yang sama, yaitu terdapat jumlah siswa yang fluktuatif dan tidak sinkronnya data di Dapodik. Pada akhirnya, rencana dan realisasi penerimaan Dana BOS belum tentu akan selalu sama. Berdasarkan petunjuk teknis Dana BOS, belum ada suatu keharusan untuk menyamai antara nominal rencana dengan realisasi.

4) Terdapat anomali disebabkan oleh nominal realisasi SPJ Dana BOS tidak sama dengan realisasi di formulir K7a. Jika dihitung berdasarkan jumlah siswa SDN 15 Bathin Solapan pada tahap III, terdapat 287 siswa x Rp900.000,00 per anaknya. Jadi, seharusnya berdasarkan data siswa sekolah, SDN 15 Bathin Solapan mendapatkan alokasi dana BOS sejumlah Rp258.300.000,00. Hal ini berbeda dengan realisasi versi K7A maupun realisasi versi laporan SPJ Dana BOS. Terdapat perbedaan Rp5.358.711 (Rp258.300.000-Rp252.941.289,00) dengan realisasi K7A dan Rp7.380.000 (Rp258.300.000,00-Rp250.920.000,00) atau sekitar 2–3% perbedaan jika dihitung berdasarkan aturan petunjuk teknis. Hal tersebut kembali tidak material. Namun, penulis tetap mengonfirmasi kepada pihak sekolah terkait temuan tersebut. Untuk jumlah pada formulir K7A, pihak sekolah masih tidak tahu kenapa jumlahnya bisa berlebih dibandingkan realisasi per laporan SPJ BOS. Khususnya realisasi K7A pada tahap II sebesar Rp126.531.289,00 yang berbeda dengan realisasi di laporan SPJ Dana BOS sebesar Rp124.510.000,00. Hal tersebutlah yang membuat terdapat dua versi realisasi.

5) Terdapat beberapa kendala teknis dan nonteknis yang dihadapi SDN 15 Bathin Solapan, yaitu perbedaan *timeline* RKAS dan realisasi Dana BOS, kurang efektifnya bekerja di sekolah dan metode kerja dalam penyusunan Dana BOS, kurangnya SDM dalam memahami sistem aplikasi penyusunan Dana BOS, dan pos-pos belanja yang masih terklasifikasi di tahun sebelumnya, di tahun berjalan terdapat perubahan secara mendesak.

6) Beberapa kendala dianalisis dan diminimalisir permasalahannya menggunakan pengendalian internal, yaitu a) Lingkungan pengendalian, seperti lokakarya dalam mengolah data, sosialisasi dan FGD dengan Dinas Pendidikan terkait untuk

mengelola Dana BOS, dan membangun lingkungan yang suportif untuk mempelajari hal baru, b) Penaksiran risiko, seperti berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan terkait baik secara formal maupun informal sebelum penyusunan SPJ BOS dan memperbanyak mengikuti sosialisasi dan lokakarya terkait prinsip laporan keuangan yang baik dan benar, c) Aktivitas pengendalian, seperti arahan dari peraturan maupun dari Kepala Sekolah dilaksanakan dengan cukup baik oleh para pegawainya dan kepatuhan SDN 15 Bathin Solapan dalam mengikuti *template* dari petunjuk teknis, arahan dari Dinas Pendidikan daerah, dan kepatuhan dalam memenuhi jadwal input Dapodik, d) Informasi dan komunikasi, seperti memastikan terdapat notifikasi di aplikasi atau masing-masing pribadi penyusun Dana BOS untuk terus melihat pemberitahuan terbaru agar tidak lagi terjadi miskomunikasi yang berakibat pada realisasi Dana BOS, dan e) Pengawasan, seperti internal sekolah sendiri dalam hal ini *stakeholder* SDN 15 Bathin Solapan memastikan nominal akhir antara realisasi pada formulir K7a sama dengan realisasi di laporan SPJ dan memastikan nominal akhir antara RKAS terakhir dengan realisasi Dana BOS.